

## Analisis Strategi Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat 2023

Azwar Khamid<sup>1</sup>, Supriyono<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [azwarkhamid2@gmail.com](mailto:azwarkhamid2@gmail.com)<sup>1</sup> , [Supriyono.stiami@gmail.com](mailto:Supriyono.stiami@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Tax Strategy, NIK to NPWP,  
Increase Compliance

*Through the Integration of NIK into NPWP policy, the Directorate General of Taxes has made a new breakthrough that will implement a Single Identification Number (SIN) between NIK and NPWP. The purpose of this research is to analyse the strategy of matching NIK to NPWP in order to increase individual taxpayer compliance at the West Bekasi Primary Tax Service Office in 2023. This research method uses a qualitative descriptive method. This research uses the theory of Azhari Aziz Samudra (Barlian, Rossya and Rulandari, 2021). The results of this study showed that the West Bekasi Primary Tax Office Strategy for the existence of the NIK to NPWP Policy has been able to increase the number and compliance of taxpayers through various media, as well as the characteristics of friendly and professional extension services. But there are still obstacles that affect the NIK to NPWP Matching strategy so that the matching process has not been fully achieved. Some strategies carried out on this policy are to improve the education process through socialisation and counseling by always utilising technological advances and various existing social media so that information about the NIK to NPWP policy can be disseminated evenly.*

---

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan berbagai kebutuhan publik. Pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, belanja pembangunan, dan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pemungutan pajak yang efektif berkontribusi pada stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan SPT Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan tingkat kepatuhan sebesar 80%, tetapi realisasi hanya mencapai 84%. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya pengetahuan perpajakan, kompleksitas sistem perpajakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, proses administrasi yang membutuhkan banyak kartu identifikasi, seperti KTP, NPWP, dan kartu keluarga, seringkali dinilai tidak praktis, sehingga menimbulkan hambatan administrasi. Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK No. 112/PMK.03/2022. Kebijakan ini dimulai pada 19 Juli 2022, dengan masa transisi hingga akhir tahun 2023, dan implementasi penuh

diharapkan pada 1 Januari 2024. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memudahkan administrasi, tetapi juga memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, penelitian di KPP Pratama Bekasi Barat menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, menganalisis penyebab rendahnya pemadanan NIK-NPWP, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasinya.

Tabel I. 1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah dan belum melakukan pemadanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Yang Sudah Melakukan Pemadanan	Yang Belum Melakukan Pemadanan
2021	260.752	104.301 (40%)	156.451 (60%)
2022	284.978	262.361 (74,25%)	73.379 (25,75%)
2023	345.996	286.971 (83%)	60.007 (17%)

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat

Dapat dilihat dari data diatas dari tahun 2021 sebesar 260.752 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi barat, sekitar 104.301 jiwa dengan presentase (40%) sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, dan sekitar 156.451 jiwa dengan presentase (60 %) belum melakukan pemadanan. Dari tahun 2022 sebesar 284.978 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi barat, sekitar 262.361 jiwa dengan presentase (74,25%) sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, dan sekitar 73.379 jiwa dengan presentase (25,75 %) belum melakukan pemadanan. Dari tahun 2023 sebesar 345.996 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi barat, sekitar 286.971 jiwa dengan presentase (83%) sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, dan sekitar 60.007 jiwa dengan presentase (17%) belum melakukan pemadanan.

Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan peneliti hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Bekasi Barat untuk melakukan pemadanan dan sekaligus pelaporan SPT nya bukan hanya yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat saja, tetapi wajib pajak yang terdaftar diluar KPP Pratama Bekasi Barat pun bisa melakukan pemadanan dan pelaporan SPT nya. Hanya saja KPP Pratama Bekasi Barat sudah menyediakan tempat terpisah untuk para wajib pajak yang terdaftar diluar KPP Pratama Bekasi Barat, dan peneliti dapat melihat dan melakukan observasi secara langsung, dengan melihat perbandingan lokasi pemadanan NIK menjadi NPWP dan pelaporan SPT wajib pajak terdaftar KPP Pratama Bekasi Barat dan yang terdaftar diluar KPP Pratama Bekasi Barat.

Tabel I. 2 Data kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Bekasi Barat	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan pelaporan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2019	238.797	75.213	60.024	85,12%
2020	249.107	80.756	68.988	85,43%
2021	273.505	86.168	63.942	74,21%
2022	284.978	77.134	62.233	80,68%
2023	345.996	94.472	67.873	71,84%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat belum mencapai angka 100% dan diharapkan atas adanya kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari data di atas, banyak wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat yang masih belum memiliki NPWP sehingga tingkat rasio kepatuhannya belum mencapai 100%. Dengan adanya kebijakan Integrasi NIK menjadi NPWP dan juga proses strategi yang dilakukan untuk mencapai target realisasi pemadanan data diharapkan akan meningkatkan jumlah orang yang berada di wilayah KPP Pratama Bekasi Barat dan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Adriani (Harjo 2019 :4) “merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Soeparman soemahamidjaja (Harjo 2019: 5) “pajak adalah iuran wajib pajak, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
2. **Strategi** : Menurut Stephanie (Rahim 2017: 4), “Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.” Menurut Rivai dan Darsono (2015), “Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus mampu membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir (sasaran/objektif); ini adalah masalah kegiatan operasi organisasi.”
3. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** : adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku untuk seumur hidup dan selamanya, yang diberikan pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali di perkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan system KTP Nasional yang terkomputerisasi.

4. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : Menurut Siti (2019:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Sedangkan menurut Madiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Gunardi (2013:94) bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan diantaranya: Penyuluh Fungsional ahli pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, Akademisi Institut STIAMI, dan 3 Orang Wajib Pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat Tahun 2023.

Azhari Aziz Samudra dalam (Barlian, Rossya & Rulandari, 2021) mengoperasionalisasi strategi pemadanan NIK menjadi NPWP dengan enam hal yaitu publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas dan pendekatan pribadi. Keenam hal tersebut saling berkaitan untuk mewujudkan tercapainya realisasi pemadanan NIK menjadi NPWP. konsep strategi pemadanan NIK menjadi NPWP dalam penelitian ini menggunakan keenam dimensi yang telah dipaparkan oleh Azhari Aziz Samudra dalam (Barlian, Rossya & Rulandari, 2021) yang mempengaruhi proses jalannya pemadanan NIK menjadi NPWP. Adapun penulis menganalisis sebagai berikut:

#### 1) Publikasi

Sebagai target keberhasilan jalannya pemadanan NIK menjadi NPWP salah satunya melihat bagaimana proses publikasi yang dijalankan. Adanya publikasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemberitahuan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi melalui media cetak dan media sosial terkait Pemadanan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Penulis memperoleh informasi dari para informan bahwa Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat melakukan publikasi dengan media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pemadanan NIK menjadi NPWP seperti Instagram, Youtube dan Facebook serta mengirimkan WhatsApp blast dan E-mail blast kepada wajib pajak, selain itu juga penyebaran media cetak dalam bentuk pamflet dan spanduk sebagai informasi dalam segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Dalam menunjang penyampaian informasi pemadanan NIK menjadi NPWP yang baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bekasi Barat diperlukan penyuluh pajak yang

memiliki karakteristik yaitu pelayanan yang ramah, profesional, bijak dan sopan supaya dapat diterima baik bagi masyarakat.

#### 2) Kegiatan

Pada hal ini merupakan penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program-program peningkatan pengetahuan masyarakat akan pengetahuan masyarakat tentang kewajibannya terhadap perpajakan. Pada kegiatannya, Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat sudah melakukan kegiatan yang namanya kelas pajak yang diadakan setiap minggu melalui zoom. Dalam kegiatan rutin inilah yang diharapkan pihak KPP Bekasi Barat akan menambah wawasan mengenai kewajibannya mereka terhadap perpajakan. Ada yang terjun langsung di tempat-tempat keramaian seperti perkantoran, pusat perbelanjaan bahkan disuatu komunitas warga dan ada juga yang melakukan sosialisasinya melalui media sosial dan media cetak. Demi keberhasilan kegiatan tersebut adapun sarana dan prasarana yang diperlukan yaitu tempat yang nyaman untuk bisa berinteraktif dengan peralatan yang memadai seperti komputer, laptop, konektivitas internet kemudian materi yang menarik serta hadiah menarik supaya masyarakat bersemangat mengikuti kegiatannya.

#### 3) Pemberitaan

Pada hal pemberitaan ini merupakan sarana promosi yang efektif sehingga pemberitaan mengenai pentingnya pemadanan NIK menjadi NPWP dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. Dari informasi yang diperoleh dari informan terkait hal ini. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dapat melakukan pemberitaannya melalui kegiatan seminar, bahkan sebelum kegiatan disampaikan berbentuk media cetak seperti flyer, artikel dan bisa juga dari media sosial yang disampaikan memakai jasa publik figur supaya ada daya tariknya. Perlu diperhatikan juga perihal waktu dalam memberitakan pentingnya melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP yaitu kapan saja setelah penerbitan kebijakan baru, terlebih saat sudah mendekati bulan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan di event-event khusus yang banyak keramaian orang.

#### 4) Keterlibatan Komunitas

Pada keterlibatan komunitas ini merupakan cara mendekati institusi pajak dengan masyarakat salah satunya dalam menyampaikan informasi pentingnya melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP kepada wajib pajak orang pribadi. Keterlibatan komunitas ini bisa dengan instansi pemerintah seperti Disdukcapil, pemerintah Daerah, Kampus-kampus, Tax Center, konsultan pajak dan pihak swasta. Mengenai langkah taktis yang harus diupayakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat yaitu melakukan pendekatan dengan instansi atau tokoh masyarakat, setelah itu kenali tentang pemadanan NIK menjadi NPWP dan ajak mereka untuk menyebarkannya.

#### 5) Pencantuman Identitas

Sebagai sarana promosi dan pengenalan Instansi, pencantuman identitas yang diterapkan adalah logo instansi. Dalam pencantuman logo pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat terdapat standar peraturan yang berlaku yaitu merujuk pada Surat Edaran Nomor SE-43/PJ/2021 tentang Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan terkait pencantuman logo sudah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku yang biasa dicantumkan di berbagai kegiatan atau berbagai media sosial dan media cetak. Adapun strategi pengenalan pemadanan yaitu terjun langsung ke masyarakat di tempat keramaian, edukasi ke kampus-kampus, bisa juga mengadakan kelas pajak dan kampanye di media sosial.

#### 6) Pendekatan Pribadi

Unsur strategi yang terakhir adalah pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi ini dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. Dari para informan diperoleh informasi bahwa pendekatan pribadi yang harus dilakukan pihak KPP Pratama Bekasi Barat adalah menyampaikannya informasi terkait pemadanan NIK menjadi NPWP dengan cara baik, bijak, komunikatif dan humanisme supaya dapat diterima wajib pajak dengan baik. Disisi lain adapun cara pengajakan yang efektif adalah penyuluh harus aktif untuk menyebarkan informasi mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP baik di media sosial maupun media cetak dan tingkatkan fasilitas pemadanan secara online serta informasikan keuntungan yang didapatkan.

### **2. Hambatan strategi pemadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat 2023**

Berdasarkan wawancara dengan para informan yang dilakukan peneliti dalam operasionalisasi Strategi pemadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat 2024 terdapat hambatan baik dari internal maupun eksternal, yaitu:

#### 1) Hambatan internal

Hambatan internal ini merupakan hambatan yang dihadapi oleh fungsional penyuluh pajak. Adapun hambatan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara yaitu:

- a. Kurangnya edukasi terkait kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.
- b. Ada beberapa data yang tidak sesuai antara data di kantor pajak dengan Disdukcapil.

#### 2) Hambatan eksternal

Hambatan eksternal ini merupakan hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP yaitu:

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak akan pemadanan NIK menjadi NPWP masih rendah.
- b. Proses yang dianggap rumit dan memakan waktu.
- c. Kendala administratif.

### **3. Upaya strategi pemadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat 2023.**

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang dilakukan peneliti dalam upaya untuk menangani hambatan operasionalisasi Strategi Pemadanan NIK menjadi NPWP yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat adalah Dipermudah akses layanan dan peningkatan infrastruktur teknologi dan Melakukan penyebaran informasi kebijakan NIK menjadi NPWP dengan lebih intens dan merata melalui media sosial, media cetak, secara langsung maupun tidak langsung. Adapun upaya yang dilakukan untuk wajib pajak yang tidak mengerti melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah perlunya pendampingan bagi wajib pajak yang kesulitan dan peningkatan akses informasi dan melakukan edukasi kepada wajib pajak lebih intens agar lebih paham lagi wajib pajak dengan kewajibannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemadanan NIK menjadi NPWP sangat dipengaruhi oleh efektivitas publikasi dan penyuluhan yang dilakukan. Publikasi yang baik melalui berbagai media, serta karakteristik pelayanan penyuluh yang ramah dan profesional, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluh seperti kelas pajak dan sosialisasi di tempat umum harus didukung dengan sarana yang memadai dan melibatkan komunitas serta instansi terkait. Selain itu, pendekatan pribadi yang komunikatif dan humanis dalam menyampaikan informasi juga diperlukan agar dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak.
2. Hambatan dalam penerapan strategi pemadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat tahun 2023. terdapat faktor penghambat dari internal yaitu:
  - 1) Kurangnya edukasi terkait kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.
  - 2) Pemadanan yang dinilai membuat kebanyakan wajib pajak dipersulit prosesnya.
  - 3) Ada beberapa data yang tidak sesuai antara data di kantor pajak dengan Disdukcapil.

Hambatan eksternal yaitu:

- 1) Tingkat kesadaran wajib pajak akan pemadanan NIK menjadi NPWP masih rendah.
  - 2) Proses yang dianggap rumit dan memakan waktu.
  - 3) Kendala administratif.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan strategi pemadanan NIK menjadi NPWP adalah Dipermudah akses layanan dan Melakukan penyebaran informasi kebijakan NIK menjadi NPWP dengan lebih intens dan merata melalui media sosial, media cetak, secara langsung maupun tidak langsung. Perlunya pendampingan bagi wajib pajak yang kesulitan melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP serta memberikan edukasi kepada wajib saat pendampingan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP itu sangat penting.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- Azhari Aziz Samudra., M.Si. 2015. PERPAJAKAN DI INDONESIA. Keuangan, Pajak,dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajawali Gravindo
- Banga, W. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer. Yogyakarta:Gava Media. Congge, U. 2017. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Belajar
- Harjo, D. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- J. Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.
- Liberti, P. 2014. Administrasi Perpajakan. Erlangga.
- Maksudi, B. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan – Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: C.V Andi Offset. Muhammad. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara (R. Kurniawan, B.Rahman, & H. Iskandar (eds.); 1st ed.). Unimal PRESS
- Pandiangan, L. 2014. Administrasi perpajakan. Bandung: Erlangga.
- Rahayu, S. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung:Rekayasa Sains
- Rahim, A dan Radjab, E. 2017. Manajemen Strategi. Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar
- Rivai, A dan Prawinegoro, D. 2015. Manajemen Strategis. Jakarta: Mitra Wacana Media. Siagian, Sondang P. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, I dan Welasari. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta:Putaka Pelajar.

## Jurnal

- Arisman, A., Kurnianingsih, R., & Endarwati, E. (2023). PELATIHAN SINKRONISASI NIK DAN NPWP UNTUK MEMUDAHKAN ADMINISTRASI PAJAK. *Suluh Abdi*, 5(2), 108-113.
- Bachmid, F. R. R., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 709-717.
- Chelsya, C., & Verawati, V. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1).
- Sari, D. P., Purwanto, M., Esa, A. O., & Kristina, N. (2023). Harmonisasi Identitas Pribadi dan Pajak Melalui Pemadanan NIK dan NPWP dalam Pendampingan SPT Tahunan WPOP. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 570-574.

SOEMARTONO, T., MINARNI, S., DEWI, K. S., & SETIOTIRIN, R. W.(2023, November). Challenges Of Coordination And Public Understanding In Implementing Nik And Npwp Integration Policies. InICCD (Vol. 5, No. 1, pp. 724-736).

Tobing, E. G. L. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK MenjadiNPWP. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(2), 183- 193.

#### Undang-undang

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 2 ayat (1a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Orang Pribadi,WP Badan dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Secara Elektronik

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-03/PJ/2022 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pemadanan Data

#### Website

Fata, R. (2022). Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN? KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil>

aceh/baca- artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-DJKN.html

Hidayat, K. (2022). Integrasi NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak Akan Surati Kementerian Hingga Perbankan. Kontan.Co.Id. Wulan Dari, K.(2020).

PengetahuanUmumPerpajakan.Pajakku.<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066>/Pengetahuan-Umum-Perpajakan